TATA KELOLA PENGENDALIAN INFLASI DI PEMERINTAH DAERAH: STUDI PADA KABUPATEN GORONTALO DAN KOTA GORONTALO

Mohamad Azriel Akbar Kai

NPP: 32.0963

Asdaf Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: mohamadazrielakbar@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Alma'Arif, S.IP., M.A.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This study focuses on the failure of Gorontalo Regency in controlling inflation, while Gorontalo City has succeeded in managing inflation effectively and has even received several national awards. **Objective:** The objective of this research is to analyze the governance of inflation control in both Gorontalo City and Gorontalo Regency. ***Method*****:** This study employs a qualitative approach through in-depth interviews (with 4 informants) and documentation, and the data is analyzed thematically using the Nvivo 12 Plus application. ***Findings*****:** The findings show that economic factors are the main reason for the failure of Gorontalo Regency in controlling inflation. This is because Gorontalo Regency only became an IHK (Consumer Price Index) region in Gorontalo Province at the beginning of 2024 and has a significantly smaller number of survey items compared to Gorontalo City. Meanwhile, regulatory factors are the main reason for Gorontalo City's success in managing inflation, as the city's government policies regarding inflation control have been well implemented. ***Conclusion:*** Gorontalo Regency has not yet optimized its strategy for managing regional inflation, whereas Gorontalo City has been very effective and successful in doing so. This study recommends strengthening the institutional capacity of the Regional Inflation Control Team (TPID), improving human resource capabilities, and integrating data as part of a collaborative inflation governance strategy.

Keywords: Gorontalo, Governance, Local Government, Inflation.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada ketidakberhasilan Kabupaten Gorontalo dalam mengendalikan inflasi sedangkan Kota Gorontalo mampu mengendalikan inflasi dengan baik hingga mendapatkan berbagai penghargaan secara Nasional. **Tujuan**: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tata kelola pengendalian inflasi di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif melalui wawancara mendalam (4 informan) dan dokumentasi, serta dianalisis secara tematik menggunakan aplikasi *Nvivo 12 Plus*. **Hasil Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor Ekonomi yang menjadi penyebab utama tidak berhasilnya Kabupaten Gorontalo dalam mengendalikan inflasi dikarenakan Kabupaten Gorontalo baru menjadi Daerah IHK di Provinsi Gorontalo pada awal tahun 2024 dan juga Kabupaten Gorontalo memiliki item survey yang jauh lebih rendah di bandingkan Kota Gorontalo. Sementara itu, Faktor Regulasi yang menjadi penyebab utama Kota Gorontalo berhasil mengendalikan inflasi di karenakan Kebijakan kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo dalam mengendalikan inflasi sudah berjalan dengan baik. **Kesimpulan:** Kabupaten Gorontalo belum optimal dalam menerapkan strategi mengenai pengelolaan inflasi di daerahnya sedangkan kota gorontalo sudah sangat optimal dan berhasil dalam mengendalikan inflasi di daerah. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan kelembagaan TPID serta peningkatan kapasitas SDM, dan integrasi data sebagai bagian dari tata kelola pengendalian inflasi yang kolaboratif.

Kata Kunci: Gorontalo, Inflasi, Pemerintah Daerah ,Tata Kelola.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara-negara di seluruh dunia saat ini tengah menghadapi tantangan percepatan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan laporan *World Economic Outlook* (WEO), pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan terus meningkat sebesar 3,2 persen pada tahun 2024 hingga 2025, dengan laju yang sama seperti pada tahun 2023. Salah satu faktor yang turut memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi global tersebut adalah inflasi. Selama beberapa dekade terakhir, inflasi global telah mengalami perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh berbagai peristiwa ekonomi dan politik, seperti krisis keuangan global tahun 2008 dan pandemi COVID-19. Mankiw menjelaskan bahwa secara global, inflasi dapat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas internasional, seperti minyak dan pangan, serta perubahan nilai tukar mata uang. (Suryani et al., 2022).

Di Indonesia sendiri, tingkat inflasi masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya di dunia. Pada September 2024, inflasi Indonesia

tercatat sebesar 1,84%, yang merupakan angka terendah sejak September 2023. Tingkat inflasi ini juga dinilai masih stabil dan berada dalam kisaran target bank sentral dunia, yaitu antara 1,5% hingga 3,5%. (*Badan Pusat Statistik Indonesia*, 2024). Meskipun demikian, kondisi geografis Indonesia yang luas menempati urutan ke-15 sebagai negara terluas di dunia dengan sekitar 17.500 pulau, 38 provinsi, serta 514 kabupaten dan kota menjadi tantangan tersendiri dalam upaya menstabilkan inflasi. Setiap daerah memiliki karakteristik wilayah yang berbeda-beda, sehingga kebijakan pengendalian inflasi perlu disesuaikan dengan kondisi lokal.

Tingginya tingkat inflasi di suatu negara dapat berdampak langsung pada penurunan kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan John Maynard Keynes yang menyatakan bahwa, "Inflasi dalam jangka panjang dapat merusak semua lapisan masyarakat dengan cara yang tidak dapat disangkal. Ini mengurangi nilai uang, mengikis tabungan, dan merusak kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi."(Melani et al., 2023). Hal ini tentu berlawanan dengan konstitusi yang mengamanatkan untuk menjamin hak hak setiap orang dan jaminan sosial kepada seluruh masyarakat. Seperti pada UUD 1945 pasal 34 yang berbunyi "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan." Untuk itu pemerintah membuat aturan aturan yang berkaitan atau berhubungan dengan inflasi seperti pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 67 tahun 2023 pasal 10 ayat (1) yang berbunyi " Insentif fiskal kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang manfaatnya diterima dan/atau dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendukung Pengendalian inflasi,Penurunan stunting,Peningkatan investasi,Penurunan kemiskinan.

Setiap provinsi yang ada di Indonesia telah di bentuk tim pengendali inflasi (TPID) dengan tugas dan tujuan yang sama yakni dapat mengendalikan dan mengontrol inflasi yang ada di provinsi tersebut. Namun meskipun sudah ada tim yang di siapkan Pemerintah untuk menangani Inflasi dalam hal ini TPID, tidak sepenuhnya menjamin stabilnya inflasi di suatu daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Masih ada beberapa Daerah yang ada di Indonesia yang angka Inflasi masih tergolong tinggi atau tidak sesuai dengan standar inflasi Nasional. Salah satu provinsi yang angka inflasinya masih tergolong tinggi yaitu Provinsi Gorontalo.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan tingkat inflasi di Provinsi Gorontalo yang sebenarnya tergolong rendah secara nasional, bahkan pernah menempati posisi kedua sebagai provinsi dengan inflasi terendah di Indonesia. Namun, setelah Kabupaten Gorontalo dimasukkan sebagai objek perhitungan, maka inflasi Provinsi Gorontalo dihitung berdasarkan rata-rata antara inflasi Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Tercatat pada Bulan Maret 2024 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa indeks harga konsumen di Provinsi Gorontalo menunjukkan inflasi Year

on Year (y-on-y) sebesar 4,13 persen. Angka inflasi y-on-y ini lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang mencapai 3,05 persen dan menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai inflasi tertinggi kedua di tingkat provinsi secara nasional. (*BPS Provinsi Gorontalo*, 2024)

kondisi inflasi di Kota Gorontalo mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu dan selalu berada di bawah standart Inflasi secara Nasional. berbanding terbalik dengan Kota Gorontalo, Inflasi di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2024 menunjukkan beberapa perubahan signifikan. Inflasi tahunan Kabupaten Gorontalo mencapai 5,58% pada Maret 2024, Namun pada bulan mei 2024 inflasi di kabupaten Gorontalo meningkat menjadi 6,31% (*BPS Provinsi Gorontalo*, 2024).

Kesenjangan lainnya terletak pada belum adanya penelitian yang secara eksplisit membandingkan tata kelola pengendalian inflasi antara dua wilayah dengan kinerja inflasi yang sangat berbeda dalam satu provinsi. Dalam konteks Provinsi Gorontalo, belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif mengkaji mengapa Kota Gorontalo mampu menekan inflasi hingga mendapat penghargaan nasional, sementara Kabupaten Gorontalo justru mengalami lonjakan inflasi yang cukup tinggi. Padahal kedua wilayah ini berada dalam konteks geografis, budaya, dan administrasi yang serupa. Ketiadaan kajian komparatif tersebut menjadikan pentingnya penelitian ini untuk mengisi celah tersebut.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks tata Kelola inflasi maupun konteks Pemerintahan Daerah. Penelitian dari Chitra Imelda Effect berjudul *of Global Economic Recession on Regional Autonomy Policy South Sumatra 2022*, menemukan bagaimana pengendalian inflasi dilakukan melalui TPIP dan TPID, serta penguatan program perlindungan sosial untuk mengurangi dampak penyesuaian harga energi. Langkah-langkah ini dianggap cukup efektif dalam menjaga pemulihan daya beli Masyarakat. Penelitian Geoff Dow dan Paul Boreham berjudul *The new Politic of Inflation and Economic Distruption 2024* menemukan bagaimana pemerintah berusaha mengendalikan inflasi melalui kebijakan yang sering kali tidak efektif, serta dampak sosial yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Penelitian dari Aurélien Goutsmedt,Clément Fontan, 2023 yang berjudul *The ECB and the inflation monsters: strategic framing and the responsibility imperative (1998-2023)* menemukan bagaimana Bank Sentral Eropa (ECB) menyesuaikan strategi dalam menghadapi krisis ekonomi. Analisis topic dan pidato-pidato ECB menunjukkan perubahan strategi dalam menangani inflasi selama periode krisis ekonomi dari 1998 hingga 2023. Penelitian dari DaSilva PP berjudul *The reregulation of capital flows in Latin America: assessing the impact of post-neoliberal government, 2023* menemukan bahwa kebijakan regulasi ketat aliran modal di Amerika Latin pasca neoliberal untuk melindungi ekonomi domestik dari besarnya variasi harga pasar global

dan menciptakan stabilitas inflasi. Penelitian dari Wansleben L berjudul *Divisions of regulatory labor, institutional closure, and structural secrecy in new regulatory states: The case of neglected liquidity risks in market-based banking* menemukan bahwa dampak negative pemisahan tugas dalam kebijakan moneter dan pengawasan keuangan di Inggris yang mana Pemisahan antara kebijakan moneter dan pengawasan ini melemahkan kapasitas dalam menangani risiko manajemen kewajiban oleh bank dan dinamika pro-siklis di pasar uang sehingga dapat mempengaruhi inflasi.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah (novelty) dalam melihat secara komprehensif tata kelola pengendalian inflasi di tingkat pemerintah daerah dengan melakukan studi perbandingan antara Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo, dua daerah dengan capaian pengendalian inflasi yang sangat kontras. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung parsial, penelitian ini menggabungkan lima dimensi analisis, yaitu faktor ekonomi, sosial, politik, regulasi, dan geografis. Selain itu, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis tematik berbantuan aplikasi Nvivo 12 Plus, yang belum banyak diterapkan dalam penelitian sejenis di Indonesia.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Chitra Imelda (2022) berfokus pada peran TPIP dan TPID dalam mengatasi resesi global di Sumatera Selatan, tanpa melihat secara holistik tata kelola lintas sektor. Selanjutnya penelitian Geoff Dow dan Paul Boreham (2024) mengangkat hubungan inflasi dan ketenagakerjaan di Australia, sedangkan Aurélien Goutsmedt dan Clément Fontan (2023) memfokuskan kajiannya pada strategi Bank Sentral Eropa dalam jangka panjang. Keduanya tidak melihat aspek kelembagaan dan konteks lokal pemerintah daerah. Terakhir, meskipun Anindita Primastuti (2023) telah membahas kolaborasi pengendalian inflasi di Kabupaten Cilacap, fokusnya terbatas pada inflasi pangan dan menggunakan metode kuantitatif. Sebaliknya, penelitian ini tidak hanya menganalisis secara kualitatif, tetapi juga memperluas cakupan dimensi tata kelola dan membandingkan dua wilayah yang berbeda tingkat efektivitasnya dalam pengendalian inflasi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami bagaimana tata kelola daerah dapat memengaruhi efektivitas pengendalian inflasi di Indonesia.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab tidak berhasilnya Kabupaten Gorontalo dalam mengendalikan inflasi dan penyebab berhasilnya Kota Gorontalo dalam mengendalikan inflasi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena mampu menggambarkan secara mendalam bagaimana tata kelola pengendalian inflasi dijalankan oleh pemerintah daerah. Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena secara kontekstual dan holistik, khususnya dalam membandingkan praktik pengendalian inflasi di Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo. Informan dipilih secara purposive, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam proses pengendalian inflasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Ketua dan Sekretaris TPID, Bappeda, Dinas Perdagangan, dan Dinas Ketahanan Pangan dari kedua daerah, karena mereka memiliki peran strategis dan pengambilan keputusan dalam kebijakan inflasi. Sementara itu, informan pendukung berasal dari pelaku pasar dan aparat teknis lapangan untuk memperkuat perspektif implementatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo selama tiga bulan, yakni Februari hingga April 2025, dengan lokasi penelitian dipilih berdasarkan perbedaan capaian inflasi yang mencolok di antara keduanya.

III. HASIL PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penyebab berhasilnya Kota Gorontalo dan penyebab tidakberhasilnya Kabupaten Gorontalo dalam mengendalikan inflasi berdasarkan 5 faktor yakni faktor ekonomi, faktor sosial, faktor regulasi, faktor politik dan faktor geografis. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Faktor Ekonomi

Analisis Nvivo pada faktor ekonomi Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo dapat dilihat pada word cloud dibawah ini:

Gambar 1

***Word Cloud* Faktor Ekonomi Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo**

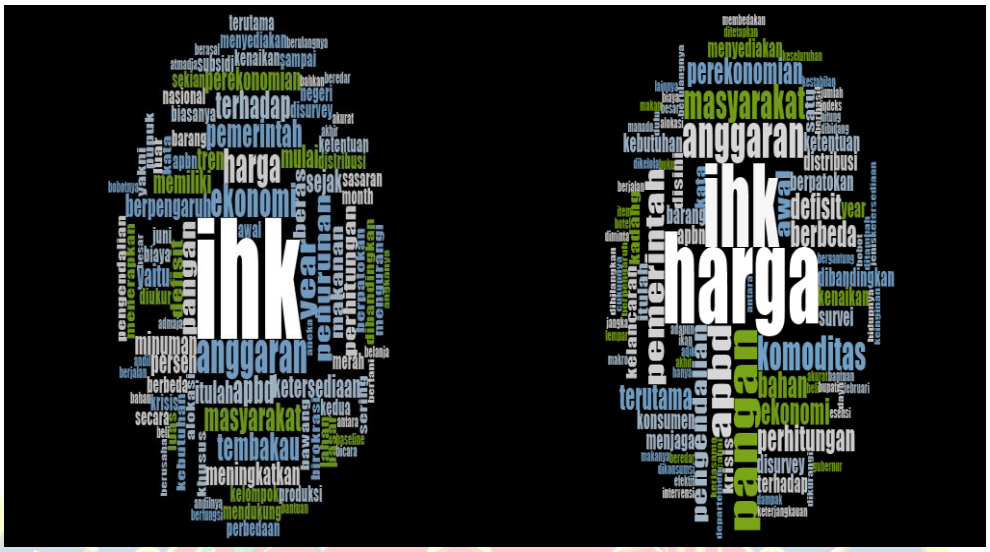

Sumber: Dianalisis menggunakan *Nvivo 12 Plus*

Inflasi ini merupakan indikator penting yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa dalam suatu wilayah. Di Indonesia sendiri, penghitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei harga yang dilakukan di wilayah-wilayah tertentu yang disebut dengan daerah IHK (Indeks Harga Konsumen). Di Provinsi Gorontalo, pada awalnya hanya terdapat satu daerah IHK, yaitu Kota Gorontalo. Artinya, seluruh perhitungan dan pelaporan inflasi di tingkat provinsi Gorontalo selama ini hanya didasarkan pada data yang dikumpulkan dari Kota Gorontalo saja. Hal ini membuat data inflasi Provinsi Gorontalo sebelumnya belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi harga secara menyeluruh di seluruh daerah yang ada di provinsi Gorontalo.

Pada bulan Februari 2024, barulah bertambah satu Kabupaten yang di tetapkkan sebagai daerah IHK yakni Kabupaten Gorontalo yang ditetapkan sebagai daerah IHK oleh Badan Pusat Statistik. Oleh karena itu, saat ini Provinsi Gorontalo memiliki dua wilayah IHK, yaitu Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Penambahan Kabupaten Gorontalo sebagai daerah IHK merupakan langkah penting dalam upaya memperluas cakupan data inflasi serta meningkatkan akurasi informasi harga di tingkat provinsi Gorontalo. Perubahan ini juga berdampak langsung terhadap metode perhitungan inflasi Provinsi Gorontalo. Jika sebelumnya inflasi provinsi hanya dihitung berdasarkan data Kota Gorontalo, kini perhitungannya dilakukan dengan pembobotan: 45% berasal dari inflasi Kota Gorontalo dan 55% dari inflasi Kabupaten Gorontalo. Penyesuaian bobot ini mempertimbangkan jumlah penduduk dan kontribusi ekonomi masing-masing daerah.

Masuknya Kabupaten Gorontalo sebagai daerah IHK baru menyebabkan munculnya perbedaan angka inflasi yang cukup mencolok antara Kota dan Kabupaten Gorontalo. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, Kota Gorontalo sudah

lama menjadi daerah IHK sehingga data yang dikumpulkan relatif stabil dan konsisten. Sementara itu, Kabupaten Gorontalo yang baru pertama kali dihitung sebagai daerah IHK masih dalam tahap penyesuaian awal, sehingga data yang dihasilkan bisa lebih fluktuatif dan mencerminkan kondisi awal yang belum stabil. Kedua, karakteristik wilayah antara kota dan kabupaten juga berbeda. Kota Gorontalo sebagai pusat ekonomi memiliki akses yang lebih mudah terhadap barang dan jasa, sementara Kabupaten Gorontalo yang wilayahnya lebih luas dan sebagian besar terdiri dari daerah pedesaan, memiliki tantangan dalam distribusi barang yang dapat menyebabkan harga lebih tinggi. Perbedaan ini juga menunjukkan bahwa selama ini kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Gorontalo lebih terfokus pada Kota Gorontalo saja, mengingat wilayah tersebut merupakan satu-satunya daerah IHK yang dijadikan acuan. Namun, dengan bertambahnya Kabupaten Gorontalo sebagai wilayah penghitungan inflasi, maka strategi pengendalian inflasi di provinsi harus turut disesuaikan.

3.2 Faktor Sosial

Analisis Nvivo pada faktor Sosial Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo dapat dilihat pada word cloud dibawah ini:

Gambar 2

***Word cloud* pada faktor sosial Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo**

Sumber: diolah oleh penulis menggunakan *Nvivo 12 Plus*

Kota Gorontalo selalu melibatkan berbagai macam pihak dalam proses pengendalian inflasi. Hal tersebut di sesuaikan dengan surat keterangan WaliKota tentang pembentukan Tim Pengendalian inflasi yang mana dalam melaksanakan pengandalian inflasi ini dilakukan oleh beberapa anggota seperti dinas Perindag, Dinas Sosial, Dinas Pangan, Kelautan, Badan Keuangan, dan Dinas Perhubungan dan

Organisasi Perangkat Daerah lainnya. Dan setiap dinas yang terlibat dalam Tim pengendalian inflasi ini melakukan tugasnya dengan baik berdasarkan tupoksinya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) berperan dalam pemantauan dan pengawasan harga di pasar, sementara Dinas Pangan bertanggung jawab terhadap pemantauan komoditas pangan serta menjadi ujung tombak dalam Satuan Tugas Pangan. Dinas Kelautan dan Pertanian bertugas menyediakan pasokan dan bantuan bagi sektor pertanian dan perikanan. Dinas Sosial mendukung dari sisi daya beli masyarakat melalui bantuan sosial seperti BPNTD, dan Dinas Perhubungan memastikan kelancaran distribusi barang.

Koordinasi antar OPD dilakukan secara intensif melalui grup komunikasi khusus untuk mendeteksi dan menangani persoalan seperti kelangkaan barang atau pelanggaran oleh pedagang. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang solid dan komunikasi yang efektif antar instansi sangat krusial dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di Kota Gorontalo. Para perangkat Daerah yang terlibat dalam menangani inflasi di Kota Gorontalo juga senantiasa melakukan komunikasi yang efektif dalam memantau harga. Selain bekerjasama dan berkoordinasi dengan sesama Pemerintah daerah dalam hal ini organisasi Perangkat Daerah, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Gorontalo juga secara rutin selalu berkoordinasi dengan Bank Indonesia Gorontalo dan pihak eksternal lainnya dan rutin melaksanakan High Level Meeting serta selalu turun ke lapangan untuk melaksanakan 4K yaitu mengecek Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran distribusi serta Komunikasi Efektif.

3.3 Faktor Politik

Analisis Nvivo pada faktor Politik Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo dapat dilihat pada word cloud dibawah ini:

Gambar 3

***Word cloud* pada faktor politik Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo**

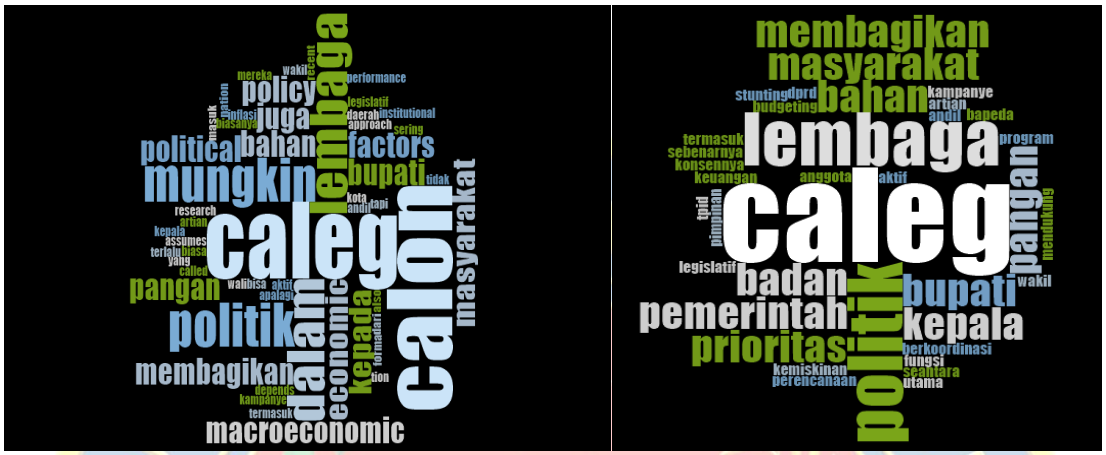

Sumber: diolah oleh penulis menggunakan *Nvivo 12 Plus*

Dukungan politik seperti anggota legislatif juga di perlukan dalam proses pengendalian inflasi di Pemerintah Daerah. Anggota legislatif mempunyai fungsi budgeting yang memiliki peran strategis dalam pengendalian inflasi di daerah karena melalui fungsi ini, Anggota legislatif juga berwenang untuk menyetujui, mengawasi, dan mengevaluasi penggunaan anggaran daerah, termasuk alokasi anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung dengan pengendalian harga dan kestabilan ekonomi. fungsi budgeting Anggota legislatif berperan dalam mengarahkan belanja daerah agar lebih responsif terhadap kondisi ekonomi khususnya di Kota Gorontalo.

Anggota Legislatif dan Pemerintah Daerah sebagai Tim Pengendalian Inflasi dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Keuangan Daerah, menunjukkan sinergi yang kuat dalam merancang dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung pengendalian inflasi. Koordinasi yang intensif antara Pemerintah daerah dan DPRD menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa isu inflasi mendapat dukungan politik dan fiskal yang memadai di Kota Gorontalo.

3.4 Faktor Regulasi

Analisis Nvivo pada faktor Regulasi Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo dapat dilihat pada word cloud dibawah ini:

Gambar 4

***Word cloud* pada faktor regulasi Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo**

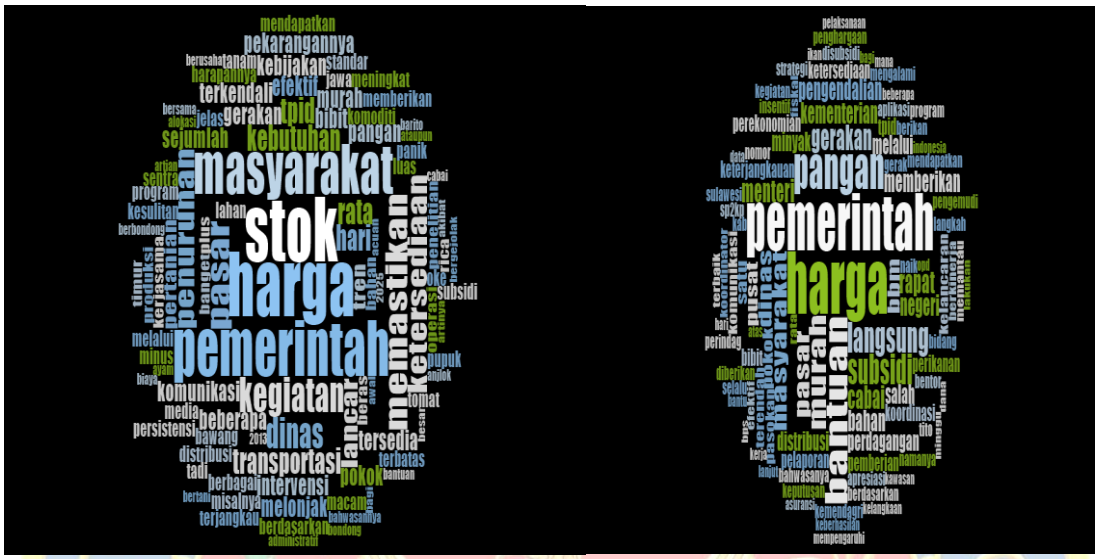

Sumber: diolah oleh penulis menggunakan *Nvivo 12 Plus*

pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontaloo memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan musim konsumsi masyarakat. Intervensi yang dilakukan tidak hanya bersifat reaktif terhadap lonjakan harga, tetapi juga bersifat preventif melalui perencanaan dan program jangka panjang yang menyentuh berbagaif aspek. Upaya ini difokuskan pada empat pilar utama, yaitu ketersediaan stok, keterjangkauan harga, komunikasi yang efektif, dan transportasi atau distribusi yang lancar.

Ketersediaan stok menjadi fondasi utama dalam menjaga kestabilan harga. Pemerintah daerah secara aktif melaksanakan program seperti pasar murah, operasi pasar, dan gerakan pangan murah yang bertujuan untuk memastikan stok tersedia di masyarakat dalam jumlah cukup. Selain itu, inovasi berupa program tanam serentak untuk komoditas strategis seperti bawang, rica, dan tomat, serta pembagian bibit kepada masyarakat, menunjukkan adanya upaya memperkuat ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga. Pendekatan ini memberikan dampak ganda, yaitu membantu mengurangi tekanan permintaan di pasar saat hari besar keagamaan dan meningkatkan kemandirian pangan masyarakat.

Kemudian, dalam aspek keterjangkauan harga, pemerintah daerah berupaya menstabilkan pasar dengan melakukan intervensi ketika terjadi lonjakan harga. Intervensi tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan konkret seperti operasi pasar dan penyaluran stok langsung ke konsumen agar harga tetap dalam batas wajar dan tidak memberatkan daya beli masyarakat.

3.5 Faktor Geografis

Analisis Nvivo pada faktor Geografis Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo dapat dilihat pada word cloud dibawah ini:

Gambar 5

***Word cloud* pada faktor regulasi Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo**

Sumber: diolah oleh penulis menggunakan *Nvivo 12 Plus*

Kota Gorontalo memiliki keunggulan yang unik dalam hal geografis. Sebagai kota yang dikelilingi oleh berbagai kabupaten yang memiliki lahan pertanian yang luas, Kota Gorontalo menjadi titik transit utama bagi barang-barang yang akan didistribusikan ke berbagai daerah. Misalnya, ketika produk pertanian dari Kabupaten Gorontalo Utara atau Kabupaten Bone Bolango ingin dipasarkan, mereka harus melalui Kota Gorontalo terlebih dahulu. Hal ini menciptakan ketergantungan yang signifikan terhadap Kota Gorontalo sebagai pusat distribusi. Oleh karena itu, kontrol yang dimiliki pemerintah kota terhadap jalur distribusi barang menjadi sangat penting dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga.

Kabupaten Gorontalo memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan Kota Gorontalo. Meskipun keduanya berbatasan langsung, perbedaan luas wilayah ini menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kondisi inflasi di kedua wilayah tersebut. Berbeda dengan Kota Gorontalo yang cenderung lebih terpusat dan memiliki akses yang lebih mudah, wilayah Kabupaten Gorontalo memiliki banyak daerah yang jauh dari pusat distribusi serta masih terbatas infrastruktur pendukungnya sehingga memang wajar bahwasanya kondisi inflasi di Kabupaten Gorontalo ini tergolong tinggi.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengungkapkan bahwa keberhasilan dan kegagalan pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi sangat dipengaruhi oleh tata kelola, khususnya pada aspek regulasi dan ekonomi. Kabupaten Gorontalo mengalami kesulitan dalam mengendalikan inflasi karena keterbatasan APBD, belum maksimalnya pengelolaan komoditas penting, jumlah item survei yang terbatas, dan baru menjadi daerah IHK pada tahun 2024. Sebaliknya, Kota Gorontalo dinilai berhasil karena dukungan regulasi yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah serta pemanfaatan sistem digitalisasi dalam pengendalian harga. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Chitra Imelda (2022) yang menekankan bahwa efektivitas pengendalian inflasi sangat tergantung pada koordinasi TPID dan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Gorontalo mampu menerapkan kebijakan terintegrasi yang melibatkan peran aktif TPID dan dukungan regulasi yang memadai.

Berbeda dengan temuan penelitian Da Silva (2021) yang menyatakan bahwa pengendalian inflasi lebih banyak dipengaruhi oleh regulasi aliran modal dan kebijakan ekonomi makro nasional, penelitian ini justru menemukan bahwa pada level daerah, faktor lokal seperti kemampuan fiskal dan keberadaan data yang akurat menjadi penentu utama efektivitas pengendalian inflasi. Temuan ini memperkuat penelitian Primastuti (2023) mengenai pentingnya kolaborasi lintas aktor dalam pengendalian inflasi. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, yang diterapkan di Kota Gorontalo, terbukti memperkuat efektivitas kebijakan pengendalian harga bahan pokok. Hal ini juga tercermin dalam penghargaan nasional yang diterima Kota Gorontalo atas kinerjanya dalam mengendalikan inflasi. Temuan ini menolak hasil penelitian Wansleben (2020) yang menunjukkan bahwa fragmentasi kelembagaan dan pembagian tugas yang tidak jelas menjadi penyebab lemahnya pengendalian risiko ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, justru ditemukan bahwa kelembagaan TPID di Kota Gorontalo memiliki struktur kerja yang jelas dan koordinatif, sehingga

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Kabupaten Gorontalo belum berhasil mengendalikan inflasi karena lemahnya faktor ekonomi. Hal ini tercermin dari kapasitas APBD yang terbatas, belum optimalnya pengelolaan komoditas strategis, rendahnya jumlah item survei IHK, serta fakta bahwa Kabupaten Gorontalo baru ditetapkan sebagai daerah IHK pada awal 2024. Keterbatasan ini menyebabkan kurangnya respons yang tepat terhadap gejolak harga dan lemahnya intervensi kebijakan lokal. Sedangkan Kota Gorontalo berhasil menekan laju inflasi karena faktor regulasi yang kuat. Kota ini mampu mengintegrasikan kebijakan nasional dan lokal dengan dukungan dari TPID, pemanfaatan sistem informasi digital, serta keterlibatan aktif antarperangkat daerah. Langkah ini diperkuat dengan penghargaan nasional yang diperoleh sebagai bentuk pengakuan atas efektivitas pengendalian inflasi.

Keterbatasan Penelitian. karena Kabupaten Gorontalo baru saja ditetapkan sebagai daerah IHK, maka beberapa indikator dan kebijakan yang dikaji masih dalam tahap transisi dan belum menunjukkan hasil yang sepenuhnya stabil dan keterbatasan waktu dalam penelitian juga membatasi eksplorasi lebih luas terhadap pendalaman dari masalah yang ada.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa karena masalah inflasi ini dapat berubah setiap waktunya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada jajaran Tim pengendalian inflasi baik di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alin, N. F., Heriberta, H., & Umiyati, E. (2019). Fakta empiris kurva U-terbalik Kuznets mengenai pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, *14*(1), 9–16. https://doi.org/10.22437/paradigma.v14i1.6788

Atmadja. (2004). Inflasi di Indonesia: Penyebab sumber-sumber dan pengendaliannya. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). *BPS*. https://www.bps.go.id

Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo. (2024). *Kota Gorontalo dalam angka 2024*. https://gorontalokota.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/b7c0d216977d1f4956af79c3/kota-gorontalo-dalam-angka-2024.html

BPS Provinsi Gorontalo. (2024). *Badan Pusat Statistik*. https://gorontalo.bps.go.id

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Faisal, & Nasution, A. (2016). Otonomi daerah: Masalah dan penyelesaiannya di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, *4*(2), 206–215. https://ja.ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/view/3370

Gilarso, T. (2013). *Pengantar ilmu ekonomi mikro*. Kanisius.

Heckelman, J. C., & Wilson, B. (2021). Targeting inflation targeting: The influence of interest groups. *Public Choice*, *189*(3–4), 533–554. https://doi.org/10.1007/s11127-021-00905-x

Martin, F. M. (2015). Debt, inflation and central bank independence. *European Economic Review, 79*, 129–150. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2015.07.009

Nurdin Ismail, & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.

Petersen, K., Feldt, R., Mujtaba, S., & Mattsson, M. (2008). Systematic mapping studies in software engineering. In *Proceedings of the 12th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering* (EASE 2008). https://doi.org/10.14236/ewic/ease2008.8

Petersen, M. L., & Van Der Laan, M. J. (2007). Petersen et al. respond to "Effect modification by time-varying covariates." *American Journal of Epidemiology, 166*(9), 1003–1004. https://doi.org/10.1093/aje/kwm230

Priyono, & Chandra. (2016). *Esensi ekonomi makro*. Zifatama.

Putong, I. (2013). *Economics: Pengantar mikro dan makro*. Mitra Wacana Media.

Rahm, A. F., Nurhaliza, I., & Balq, S. (2024). Analisis pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*.

Ramadhan, A. M. (2023). Pengertian dan macam-macam kerangka berpikir penelitian. *Ebizmark Blog*.

Rositawati, A. F. D., & Halumma, Z. F. (2022). Inflation control through modeling results of factors that affecting inflation using robust time series regression S-estimation and MM-estimation. *Government and Statistics*.

Sarosa, S. (2021). *Analisis penelitian kualitatif*. PT Kanisius.

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Alfabeta.

Stiglitz, J. E. (2012). The price of inequality. *Journal of Social Policy*.

Sukirno, S. (2016). *Makro ekonomi teori pengantar*. PT Rajawali Pers.

Suryani, G. C., Fevriera, S., & Adhitya, D. (2022). Determinan tingkat inflasi Indonesia tahun 1989–2018. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat, 1*(1), 16–36. https://doi.org/10.24246/dekat.v1i1.4714

Telatar, E., Telatar, F., Cavusoglu, T., & Tosun, U. (2010). Political instability, political freedom and inflation. *Applied Economics, 42*(30), 3839–3847. https://doi.org/10.1080/00036840802360237

von Wallwitz, G. (2023). It's the politics, stupid! *Wirtschaftsdienst, 103*(2), 98–101. https://doi.org/10.2478/wd-2023-0030